

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada sektor keuangan khususnya di bidang perbankan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia, karena pada bidang perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dalam suatu negara. Pada masa pemulihan ekonomi, bank masih belum optimal dalam melakukan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary*), yaitu penghimpun dana dan penyalur atau pemberi kredit. Dalam kegiatannya bank tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank harus menyalurkan kembali dana yang diperoleh dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediacy*), bank diharapkan akan mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Dalam pemberian kredit pihak bank harus benar-benar teliti karena dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi oleh kepercayaan. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, kondisi kesehatan bank harus dikelola dengan baik yaitu dengan cara menjaga likuiditas bank tersebut. Untuk kepentingan likuiditas suatu bank, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang

mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak dengan cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Saat ini persaingan di dalam dunia perbankan semakin ketat dengan kondisi perekonomian yang semakin lama semakin terbuka. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki suatu kontrol terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank. Sehingga Bank Indonesia menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan kebijakan di dalam dunia perbankan yang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia telah meluncurkan API sebagai kebijakan secara menyeluruh pengembangan industri perbankan untuk ke depannya. Salah satu program API adalah mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar. Kebijakan API ini membahas tentang struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, serta perlindungan konsumen.

Dalam program kegiatan API ini banyak pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan, diantaranya para manajer, investor, pemerintah, masyarakat bisnis, maupun lembaga-lembaga yang terkait. Manajemen sangat memerlukan hasil penilaian terhadap unit bisnisnya, yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan manajer serta sebagai

evaluasi dalam menyusun strategi maupun operasi pada masa yang akan datang. Kinerja perbankan yang baik dapat menarik investor untuk berinvestasi pada bank tersebut, karena semakin sehat bank tersebut maka semakin baik pula manajemen bank tersebut. Selain itu, pemerintah juga sangat berkepentingan dalam menilai kinerja lembaga keuangan guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sedangkan masyarakat menginginkan perusahaan perbankan yang sehat dan maju sehingga efisiensi dana berupa biaya yang murah dan efisien dapat tercapai.

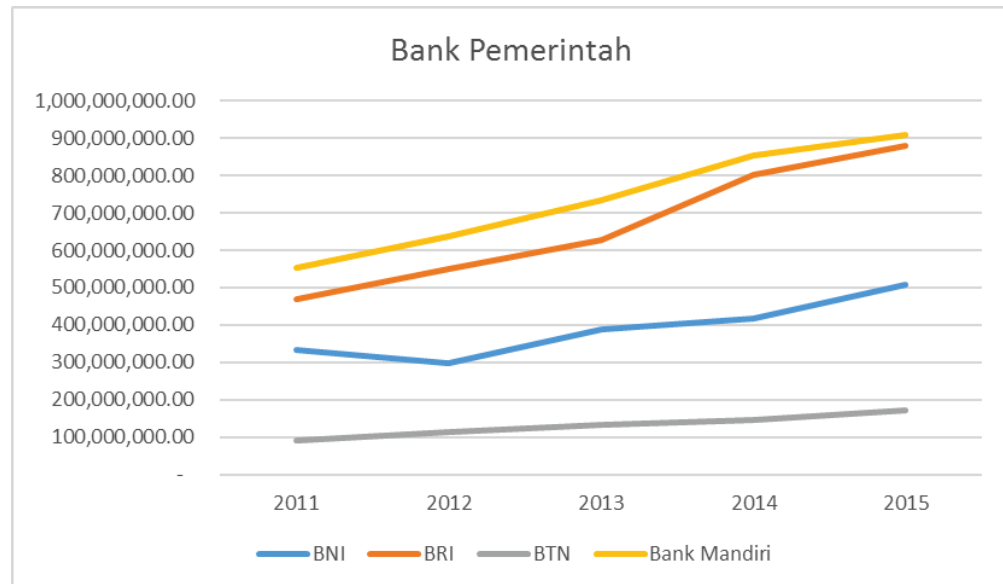
Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan bank adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung rasio yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank (Kasmir, 2012). Tujuan penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai *input* bagi bank dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank.

Terdapat metode guna menilai kesehatan bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap beberapa faktor yaitu profil risiko (*risk profile*), *good corporate*

governance (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*) atau biasa dikenal dengan pendekatan RGEK.

Bank pemerintah merupakan bank yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari pengawasan yang dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan bank dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, bank yang termasuk bank pemerintah adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri. Semakin lama bank milik pemerintah ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang cukup bagus dengan mengalami kenaikan total aset dalam setiap tahunnya. Kenaikan total aset tersebut disebabkan oleh aktiva produktif yang dimiliki bank pemerintah yang berupa dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan berjalan dengan baik. Kenaikan jumlah total aset bank milik pemerintah yaitu BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Kenaikan Total Aset Bank Pemerintah tahun 2011-2015



Sumber: IDX Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat tahun 2011-2015 atau www.idx.co.id (data diolah)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di uji dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada masing-masing bank umum milik pemerintah dengan menggunakan pendekatan RGEC pada tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian ini yaitu :

Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada masing-masing bank umum milik pemerintah yaitu dengan menggunakan pendekatan RGEC pada tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, sehingga dapat mengetahui tingkat kesehatan bank.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah referensi dalam melakukan penelitian secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.